

ABSTRAK

Kasus korupsi di bidang kepabeanan dalam pelayanan impor tekstil sebagaimana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan tersebut dipengaruhi pengaturan standar pelayanan kepabeanan yang belum memberikan kejelasan pengaturan yang seragam dan terintegrasi, khususnya pada pelayanan impor tekstil nonfasilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam norma umum pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum sepenuhnya dijabarkan dalam pengaturan sektoral di bidang kepabeanan. Penelitian ini berfokus pada pengaturan standar pelayanan kepabeanan impor tekstil dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta mengkaji fungsi standar pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pelayanan publik dan kepabeanan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep standar pelayanan publik dan pencegahan korupsi dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan. Penelitian ini didukung dengan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst untuk melihat keterkaitan antara kelemahan standar pelayanan dan praktik pelayanan kepabeanan dalam sektor impor tekstil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan standar pelayanan kepabeanan masih terbatas pada jenis layanan tertentu dan belum menjangkau secara utuh pelayanan impor tekstil nonfasilitas. Akibatnya, standar pelayanan tersebut belum berfungsi secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan standar pelayanan kepabeanan serta penguatan kedudukan standar pelayanan sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan pelayanan impor tekstil guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Publik, Kepabeanan, Pencegahan Korupsi.

ABSTRACT

The corruption case in the customs sector in textile import services as stated in Decision Number 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst shows that there are serious problems in the implementation of public services. These problems are influenced by customs service standards that lack clarity and integration, particularly in non-facility textile import services. This condition indicates that the provisions in the general norms of public services as stipulated in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services have not been fully explained in sectoral regulations in the customs sector. This study focuses on the synchronization of customs service standards for textile imports with the provisions of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, as well as examining the function of public service standards as an instrument for preventing corruption.

This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. The legislative approach is carried out by examining the legal provisions governing public services and customs, while the conceptual approach is used to examine the concepts of public service standards and corruption prevention from the perspective of administrative law. This study is supported by a case study of Decision Number 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst to examine the relationship between weak service standards and customs service practices in the textile import sector.

The results of the study show that customs service standards are still limited to certain types of services and do not fully cover non-facility textile imports. As a result, these service standards are not functioning optimally as stipulated in Article 21 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. Therefore, it is necessary to synchronize customs service standard regulations and strengthen the position of service standards as normative guidelines in the implementation of textile import services in order to improve transparency, accountability, and legal certainty.

Keywords: *Public Service Standards, Customs, Corruption Prevention.*